



Rencana Kerja Perangkat Daerah
(RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2026
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU





SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, menyebutkan bahwa rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);

10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 36 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 dan dokumen lainnya yang mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 November 2025

Plt. GUBERNUR RIAU,

TTD

S. F. HARIYANTO

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 November 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

TTD

SYAHRIAL ABDI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 NOMOR : 39

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

YAN DHARMADI, SH, MH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19840326 200903 1 003



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR DIAGRAM	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	22
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	36
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	44
2.6 Kelompok Sasaran Layanan	48
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	49
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	49
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	50
3.3 Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan.....	51
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	62
BAB V PENUTUP	84
5.1 Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian	84
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	84
5.3 Rencana Tindak Lanjut	85

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	(T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja	13
Tabel 2.2	(T-C30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
Tabel 2.3	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2019 - 2023	23
Tabel 2.4	Peringkat IPK Provinsi Riau 2018 – 2023	24
Tabel 2.5	Rekapitulasi Data Objek Pemajuan Kebudayaan Tahun 2018 - 2024	25
Tabel 2.6	Data OPK Yang Dilindungi Tahun 2020 – 2024	26
Tabel 2.7	Data OPK Yang Dikembangkan Tahun 2020 – 2024	26
Tabel 2.8	Data OPK Yang Dimanfaatkan Tahun 2020 – 2024	27
Tabel 2.9	Sumber Daya Manusia dan Lembaga Kebudayaan di Provinsi Riau Tahun 2024	28
Tabel 2.10	Penetapan Warisan Budaya Tak Benda dan Cagar Budaya Provinsi Riau Tahun 2020 - 2024	29
Tabel 2.11	(T.C.31) Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026	38
Tabel 2.12	(T-C.32) Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026	45
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2026	51
Tabel 3.2	(T-C.33) Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 Dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Pemerintah Provinsi Riau	53
Tabel 4.1	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2026	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Diagram Proses Penyusunan Renja	2
Gambar 1.2	Diagram Keterkaitan Dokumen	4
Gambar 2.1	Dimensi Pengukuran IPK	22

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2.1	IPK nasional terhadap capaian IPK Provinsi Riau Tahun 2018-2023	23
-------------	--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2026 merupakan dokumen Rencana Kerja adalah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan dinas, RENJA "menjembatani" sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah - langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur.

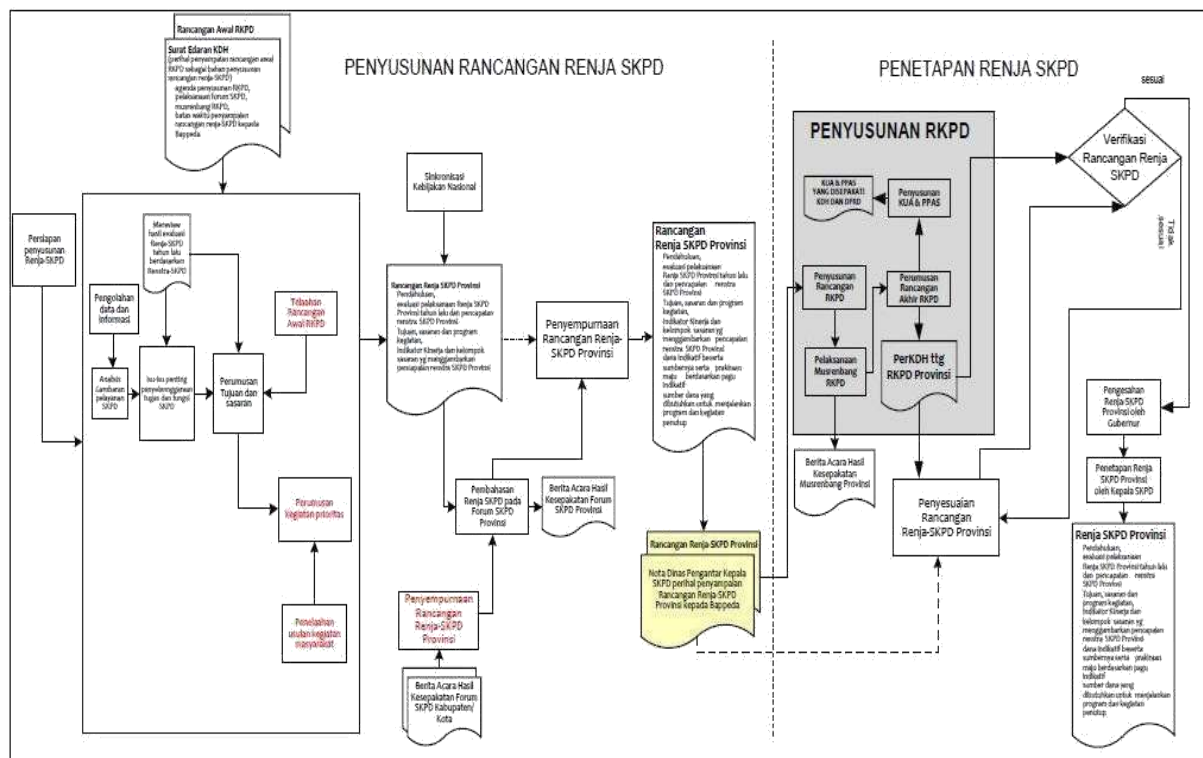
Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dapat dijelaskan dari diagram pada Gambar 1 dengan uraian sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan

Persiapan penyusunan renja meliputi :

- a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah
- b. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD

Gambar 1.1 Diagram Proses Penyusunan Renja



2. Penyusunan Rancangan Awal

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup:

- Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan
- Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

3. Penyusunan Rancangan

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah dan sudah harus selaras dengan rancangan awal RPKD.

4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh

kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA Provinsi Riau dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.

5. Perumusan Rancangan Akhir

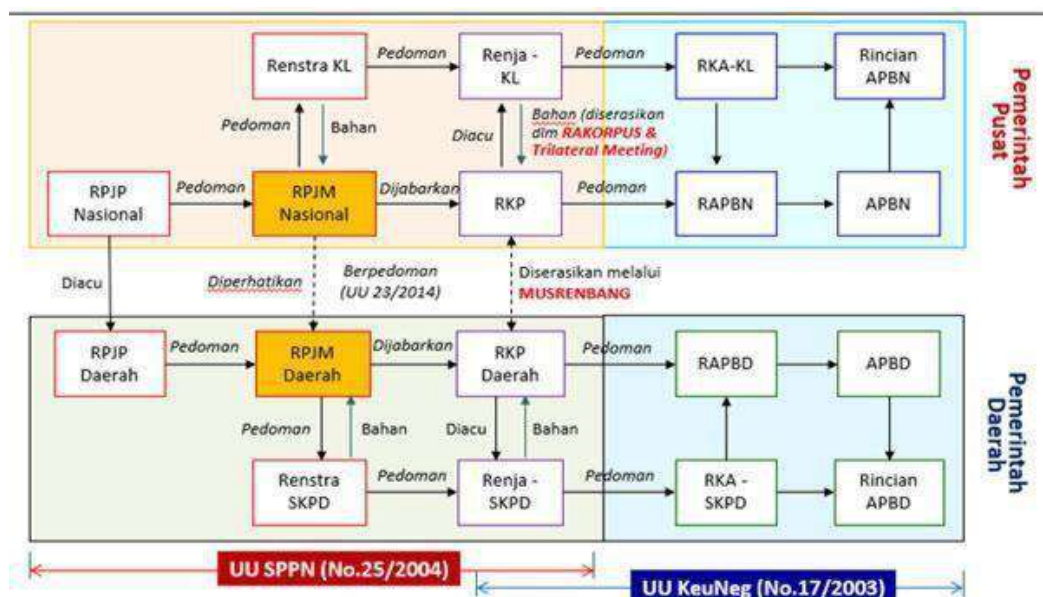
Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

6. Penetapan

Dinas Kebudayaan menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra perangkat daerah, dengan Renja K/L serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD dapat dilihat pada diagram berikut :

Gambar 1.2 Diagram Keterkaitan Dokumen



Penyusunan Renja *Dinas Kebudayaan* dari rancangan awal renja sampai rancangan akhir renja dipengaruhi oleh dokumen perencanaan lainnya yaitu renstra *Dinas Kebudayaan*, rancangan awal RKPD, dan rancangan akhir RKPD.

Pada penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan berpedoman pada:

1. Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
2. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dilakukan.

Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada Rancangan Awal RKPD. Renja tersebut juga dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah. Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Bappedalitbang Provinsi Riau untuk diverifikasi. Verifikasi tersebut harus dapat menjamin Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD. Renja hasil verifikasi tersebut akan dijadikan bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Renja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
7. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau;
22. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2025 - 2045;
23. Peraturan Gubernur Riau Nomor 66 Tahun 2017 Tentang

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kebudayaan Provinsi Riau;

24. Peraturan Gubernur Riau Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penerapan Muatan Budaya Melayu Riau Di Ruang Umum;
25. Peraturan Gubenur Riau Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
26. Peraturan Gubernur Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029;
28. Peraturan Gubernur Riau Nomor 36 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2026;
29. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1094/XI/2025 tentang Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi Riau.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2026 ini adalah dimaksudkan untuk memberikan arah dan acuan dalam penyusunan program dan kegiatan/sub kegiatan periode 1 (satu) tahun sebagaimana yang diamanatkan dalam Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025-2026 yang meliputi sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.
2. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan yang berpedoman pada RKPD Provinsi Riau
3. Sebagai bahan masukan program/kegiatan/sub kegiatan yang ada ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Renja Dinas Kebudayaan Provinsi

Riau Tahun 2026 adalah:

1. Menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi sub kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah;
2. Untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra perangkat Daerah;
3. Mendeskripsikan tentang program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Riau;
4. Sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan tahunan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja terdiri dari 5 (lima) bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Sub bab ini berisi uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sub bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

2.6 Kelompok Sasaran Layanan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan/sub kegiatan,

uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan/sub kegiatan serta Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat uraian terkait program dan kegiatan/sub kegiatan serta pagu indikatif.

BAB V PENUTUP

Berisi uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun apabila adanya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bagian ini menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2024 dan perkiraan capaiannya ditahun 2025 serta capaian Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025 Triwulan II, sesuai dengan tabel T-C.29 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang disajikan pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1 (T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Provinsi Riau

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Perangkat Daerah (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Kebudayaan	100%	-	-	-	-	100%	100%	100,00%
2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	-	-	-	-	5 Dokumen	5 Dokumen	50,00%
2.22.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	10 Dokumen	-	-	-	-	5 Dokumen	5 Dokumen	50,00%
2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi	24 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	50,00%
2.22.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	160 Orang/Bulan	-	-	-	-	80 Orang/Bulan	80 Orang/Bulan	50,00%
2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Laporan Administrasi Umum yang dipenuhi	10 Jenis layanan	-	-	-	-	5 Jenis layanan	5 Jenis layanan	50,00%
2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	16 Paket	-	-	-	-	8 Paket	8 Paket	50,00%
2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	32 Paket	-	-	-	-	16 Paket	16 Paket	50,00%
2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	8000 Paket	-	-	-	-	4000 Paket	4000 Paket	50,00%
2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket	-	-	-	-	8 Paket	8 Paket	50,00%
2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	-	-	-	-	35 Laporan	35 Laporan	50,00%

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Perangkat Daerah (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	6 Jenis Barang	-	-	-	-	3 Jenis Barang	3 Jenis Barang	50,00%
2.22.01.1.07.00010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	-	-	-	-	10 Unit	10 Unit	50,00%
2.22.01.1.07.00011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	50,00%
2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi	4 Jenis	-	-	-	-	2 Jenis	2 Jenis	50,00%
2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	24 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	50,00%
2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor yang disediakan	24 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	50,00%
2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	6 Jenis	-	-	-	-	3 Jenis	3 Jenis	50,00%
2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan/ Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit	-	-	-	-	9 Unit	9 Unit	50,00%
2.22.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	50,00%
2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200 Unit	-	-	-	-	100 Unit	100 Unit	50,00%
2.22.01.1.09.00011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6 Unit	-	-	-	-	4 Unit	4 Unit	66,67%
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah data OPK yang dilindungi dan dikembangkan	106 Data OPK	-	-	-	-	96 Data OPK	96 Data OPK	90,57%

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Perangkat Daerah (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Kebudayaan Lintas Kabupaten/ Kota yang dikelola	2,27%	-	-	-	-	2,24%	2,24%	98,68%
2.22.02.1.01.0001	Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	19 Objek	-	-	-	-	14 Objek	14 Objek	73,68%
2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumberdaya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1400 Orang	-	-	-	-	700 Orang	700 Orang	50,00%
2.22.02.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana taman Budaya yang disediakan dan dipelihara	2 Unit	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	50,00%
2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi	Persentase pelestarian kesenian tradisional	2,27%	-	-	-	-	2,24%	2,24%	98,68%
2.22.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	11 Objek	-	-	-	-	11 Objek	11 Objek	100,00%
2.22.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/ Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	24 Sertifikat	-	-	-	-	12 Sertifikat	12 Sertifikat	50,00%
2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas daerah Kabupaten/ Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi	Jumlah Lembaga Adat yang di bina	2 Lembaga	-	-	-	-	1 Lembaga	1 Lembaga	50,00%
2.22.02.1.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah dilakukan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan	2 Objek	-	-	-	-	1 Objek	1 Objek	50,00%
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian tradisional yang dikembangkan	2,24%	-	-	-	-	2,21%	2,21%	98,66%
2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kab/Kota	Persentase pembinaan kesenian	100%	-	-	-	-	100%	100%	100,00%

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Perangkat Daerah (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.22.03.1.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang mengikuti Proses Standarisasi	20 Sertifikat	-	-	-	-	10 Sertifikat	10 Sertifikat	50,00%
2.22.03.1.01.0003	Peningkatan kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	24 Lembaga	-	-	-	-	12 Lembaga	12 Lembaga	50,00%
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah Sejarah yang dibina	100 Objek	-	-	-	-	50 Objek	50 Objek	50,00%
2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sejarah Lokal Kab/Kota yang dibina	24 Kab/Kota	-	-	-	-	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	50,00%
2.22.04.1.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang diberdayakan	30 Orang	-	-	-	-	10 Orang	10 Orang	33,33 %
2.22.04.1.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	2 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	50,00%
2.22.04.1.01.0004	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	Jumlah Penulisan Sejarah Lokal Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal	2 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	50,00%
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya yang dilindungi	156 Objek	-	-	-	-	146 Objek	146 Objek	93,59%
2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Persentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	10%	-	-	-	-	5%	5%	50,00%
2.22.05.1.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	40 Objek	-	-	-	-	20 Objek	20 Objek	50,00%
2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang ditetapkan	30 Objek	-	-	-	-	15 Objek	15 Objek	50,00%
2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang dikelola	4 Objek	-	-	-	-	2 Objek	2 Objek	50,00%
2.22.05.1.02.0001	Perlindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	2 Objek	-	-	-	-	1 Objek	1 Objek	50,00%
2.22.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang dikembangkan	2 Objek	-	-	-	-	1 Objek	1 Objek	50,00%
2.22.05.1.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	2 Objek	-	-	-	-	1 Objek	1 Objek	50,00%

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Perangkat Daerah (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.22.05.1.02.0004	Pembinaan Dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	20 Orang	-	-	-	-	10 Orang	10 Orang	50,00%
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Museum	90 Poin	-	-	-	-	85 Poin	85 Poin	94,44%
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	Nilai Akreditasi Museum	A	-	-	-	-	B	B	100,00%
2.22.06.1.01.0001	Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	10 Unit	-	-	-	-	5 Unit	5 Unit	50,00%
2.22.06.1.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang ditingkatkan mutu dan kapasitasnya	10 Orang	-	-	-	-	5 Orang	5 Orang	50,00%
2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	2 Unit	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	50,00%
2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang tersedia	2 Unit	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	50,00%
2.22.06.1.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang direvitalisasi	2 Unit	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	50,00%

Sebagaimana Tabel T-C.29 diatas, terhadap Renja Tahun 2025 (Renja Tahun Berjalan) hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu adalah untuk Renja 2024 (tahun n-2) sedangkan terhadap realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada Renstra Tahun 2025-2026. Uraian ringkas hasil evaluasi dan realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi, telah memenuhi, dan melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :

2.1.1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dari tabel 2.1 terhadap realisasi Renstra yang terdapat program yang tidak memenuhi target yaitu :

- Program Pembinaan Sejarah, terhadap kondisi kinerja pada akhir periode Renstra 2025-2026 Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Perangkat Daerah sebesar 50,00 %.

2.1.2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dari tabel. 2.1 hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 terdapat 5 (lima) program di Dinas Kebudayaan Provinsi Riau yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Perangkat Daerah sebesar 100%.
- b. Program Pengembangan Kebudayaan dengan indikator Jumlah Data Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dilindungi dan dikembangkan, Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Perangkat Daerah sebesar 90,57 %.
- c. Program Pengembangan Kesenian Tradisional dengan indikator Persentase Kesenian tradisional yang dikembangkan, Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Perangkat Daerah sebesar 98,66 %.
- d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dengan indikator Jumlah Cagar Budaya yang dilindungi, Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Perangkat Daerah sebesar 93,59 %.

- e. Program Pengelolaan Permuseuman
dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Museum, Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Perangkat Daerah sebesar 94,44 %.

2.1.3. Realisasi Program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Dari tabel 2.1 hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 tidak terdapat program yang melebihi target kinerja terhadap target akhir periode Renstra 2025 - 2026.

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Riau periode Tahun 2025-2026, sehingga mempengaruhi pengukuran kinerja. Terhadap Renstra periode sebelumnya dan Renja 2024 tidak dilakukan pengukuran/ perhitungan, maka pengukuran hanya terhadap Renstra 2025 - 2026.

Selanjutnya Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan secara umum sebagai berikut :

- a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan antara lain :

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu yaitu untuk Renja 2024 sebagaimana gambaran diatas tidak dapat dilakukan evaluasi karena terhadap realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada Renstra Tahun 2025-2026.

- b. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau target kinerja program/kegiatan
Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan karena program/kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran

2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah dari gambaran Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2025, telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Riau dimana

berdasarkan indikator kegiatan telah ditetapkan target kinerja OPD dalam kerangka pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Dengan adanya indikator yang tidak tercapai pada tahun anggaran yang telah ditetapkan menimbulkan implikasi perlambatan dalam pencapaian target kinerja pada Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, dan kedepan diharapkan adanya inovasi percepatan dalam pencapaian target kinerja tersebut dengan dukungan pengambil kebijakan serta mencermati kembali sebagai masukan dalam penyusunan Renja tahun berikutnya.

- 2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Penyesuaian terhadap perencanaan dan penganggaran berkaitan erat dengan ketersediaan anggaran yang dimiliki Pemerintah Provinsi Riau, sehingga perlu adanya kebijakan untuk mengantisipasi dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dilingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Perlunya koordinasi dengan berbagai pihak baik dengan instansi pemerintah, kabupaten/kota maupun masyarakat mengingat luasnya ruang lingkup pemajuan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Subbab Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ini berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Indikator Kinerja Utama. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah sesuai dengan tabel T-C.30 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang disajikan pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

No	Indikator	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Pemajuan Budaya Melayu Riau			45,45	54,54	63,63	74,74	45,45	-	63,63	74,74	
2	Persentase Budaya Melayu Riau yang dilindungi			80,40	-	-	-	81,29	-	-	-	
3	Persentase Budaya Melayu Riau yang dikembangkan			10,00	-	-	-	10,03	-	-	-	
4	Persentase Budaya Melayu Riau yang dimanfaatkan			6,00	-	-	-	6,59	-	-	-	
5	Nilai Ekspresi Budaya (Nilai)			-	47,69	49,18	50,67	-	-	49,18	50,67	
6	Nilai Warisan Budaya (Nilai)			-	57,40	58,90	60,40	-	-	58,90	60,40	

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sebagaimana
Tabel 2.2 adalah sebagai berikut :

1. Indikator Tujuan

Untuk indikator tujuan Persentase Pemajuan Budaya Melayu Riau dengan target tahun 2024 sebesar 45,45% terealisasi sebesar 45,45%, untuk tahun 2025 ditargetkan sebesar 54,54%, sedangkan untuk tahun 2026 diproyeksikan sebesar 63,63% dan tahun 2027 diproyeksikan sebesar 74,74%.

2. Indikator Sasaran

- a. Persentase Budaya Melayu Riau yang dilindungi dengan target tahun 2024 sebesar 80,40% terealisasi sebesar 81,29%, untuk tahun 2025 target Indikator sudah berubah.
- b. Persentase Budaya Melayu Riau yang dikembangkan dengan target tahun 2024 sebesar 10,00% terealisasi sebesar 10,03%, untuk tahun 2025 target Indikator sudah berubah.
- c. Persentase Budaya Melayu Riau yang dimanfaatkan dengan target tahun 2024 sebesar 6,00% terealisasi sebesar 6,59%, untuk tahun 2025 target Indikator sudah berubah.
- d. Nilai Ekspresi Budaya pada tahun 2024 belum menjadi indikator kinerja

sehingga tidak ditetapkan target. Untuk tahun 2025 ditargetkan sebesar 47,69%, tahun 2026 ditargetkan sebesar 49,18% dan tahun 2027 ditargetkan sebesar 50,67%.

- e. Nilai Warisan Budaya pada tahun 2024 belum menjadi indikator kinerja sehingga tidak ditetapkan target. Untuk tahun 2025 ditargetkan sebesar 57,40%, tahun 2026 ditargetkan sebesar 58,90% dan tahun 2027 ditargetkan sebesar 60,40%.

23 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

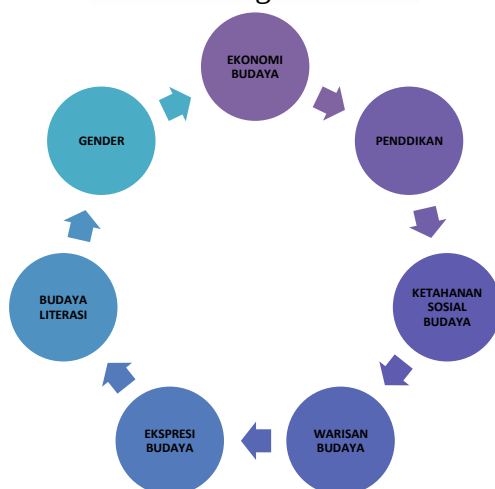
2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis Yang Terkait Dengan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Riau

IPK disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang di antaranya membahas tentang unsur pemajuan kebudayaan, sepuluh objek pemajuan kebudayaan (OPK), ekosistem kebudayaan dan pengarusutamaan kebudayaan dari hulu ke hilir. IPK ini juga menjadi indeks pengukuran yang dapat secara spesifik mengukur capaian pembangunan kebudayaan di tingkat nasional dan daerah di berbagai wilayah nusantara.

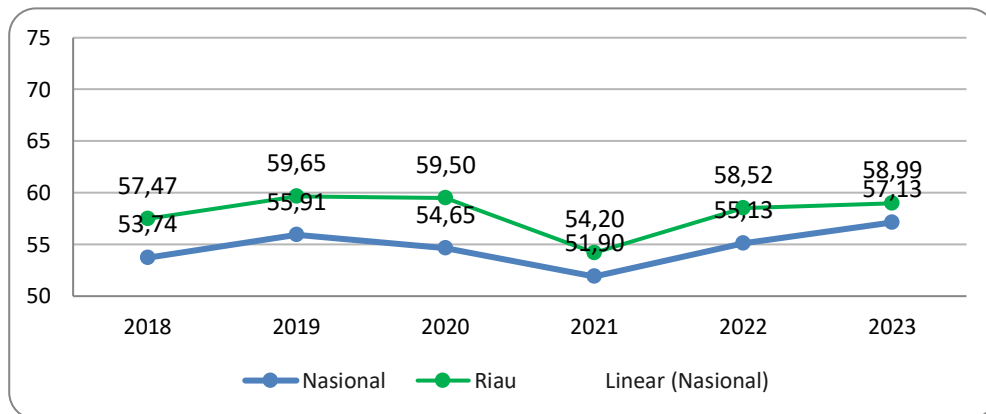
IPK juga digunakan sebagai indikator pembangunan RPJMN (rencana pembangunan jangka menengah nasional) 2020-2024. RPJMN keempat yang bertemakan “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan” ini memiliki tujuh prioritas. Satu di antaranya yaitu revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Ruang lingkup perhitungannya memiliki 7 dimensi pengukuran dan 31 indikator.

Gambar 2.1
Dimensi Pengukuran IPK



Secara nasional capaian indeks pemajuan kebudayaan Provinsi Riau cukup baik, dari tahun 2018 sd 2023 capaiannya di atas rata-rata capaian nasional.

Diagram 2.1
IPK nasional terhadap capaian IPK Provinsi Riau Tahun 2018 - 2023



Sumber Data : Kemendikbudristek RI Tahun 2024

IPK dibentuk melalui tujuh dimensi yang memiliki ruang lingkup cukup luas dan bersifat lintas sektor, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2020 - 2023

No.	Dimensi	Bobot Dimensi	Nilai 2020	Nilai 2021	Nilai 2022	Nilai 2023
D1	Ekonomi Budaya	0.10	42.45	26.35	39.34	30,73
D2	Pendidikan	0.20	75.29	74.27	76.22	78,03
D3	Ketahanan Sosial Budaya	0.20	75.64	70.07	73.88	75,30
D4	Warisan Budaya	0.25	48.00	47.47	51.75	53,02
D5	Ekspresi Budaya	0.10	36.05	22.31	25.39	26,54
D6	Budaya Literasi	0.10	65.25	56.39	61.92	63,46
D7	Gender	0.05	58.82	59.20	57.91	60,03
IPK Provinsi Riau			59.50	54.20	58.52	58,99
IPK Nasional			54,65	51,90	55,13	57,13

Sumber Data : Ditjen Kebudayaan - Kemendikbudristek RI Tahun 2024

IPK Riau periode sebelum pandemi Covid 19 meningkat dari 57,47 pada 2018 menjadi 59,65 pada 2019. Peningkatan tersebut didukung oleh pertumbuhan hampir di seluruh dimensi pembentuknya, kecuali Dimensi Gender. Dimensi Pendidikan tumbuh paling tinggi sebesar 6,34% menjadi 77,23

pada periode yang sama. Sementara itu, Dimensi Gender mengalami penurunan sebesar 1,47% menjadi 60,24.

Pada tahun pertama Pandemi Covid, skor IPK Riau cenderung stabil meskipun sedikit mengalami penurunan sebesar 0,25%. Peringkatnya meningkat ke posisi 4. Namun, pada tahun kedua pandemi skor IPK Riau menurun cukup tajam, yakni sebesar 8,91% menjadi 54,20. Pada tahun ini peringkatnya turun ke posisi 8. Hampir seluruh dimensi pembentuknya menurun, kecuali Dimensi Gender. Dimensi yang mengalami penurunan terbesar, yaitu Dimensi Ekonomi Budaya, Dimensi Ekspresi Budaya, dan Dimensi Budaya Literasi.

Memasuki periode Pasca Pandemi, skor IPK Riau mengalami perbaikan. Skor IPK berhasil meningkat dari tahun 2021 sebesar 54,20 menjadi 58,99 pada tahun 2023, diiringi dengan meningkatnya seluruh dimensi pembentuk. Dimensi yang mengalami peningkatan paling besar, yaitu Dimensi Budaya Literasi skor 56,39 pada tahun 2021 menjadi 63,46 pada tahun 2023 atau meningkat sebesar 7,07 poin, sedangkan Dimensi yang mengalami peningkatan paling kecil yaitu Dimensi Gender dengan skor pada tahun 2021 sebesar 59,20 menjadi 60,03 pada tahun 2023 atau meningkat sebesar 0,83 poin. IPK Riau pada periode ini mengalami penurunan peringkat baik nasional maupun sumatera, yakni menduduki peringkat 10 untuk nasional dan peringkat 4 untuk sumatera.

Tabel 2.4 Peringkat IPK Provinsi Riau 2018 – 2023

Tahun	IPK		Peringkat Nasional	Peringkat Sumatera
	Nasional	Riau		
2018	53,74	57,47	7	-
2019	55,91	59,65	7	-
2020	54,65	59,50	4	1
2021	51,90	54,20	8	2
2022	55,13	58,52	4	1
2023	57,13	58,99	10	4

Sumber Data : Kemendikbudristek RI Tahun 2024

Selanjutnya secara ringkas data OPK berdasarkan pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah dan perkembangannya sampai dengan tahun 2024 disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.5
Rekapitulasi Data Objek Pemajuan Kebudayaan Tahun 2018 - 2024

No	Obyek Pemajuan Kebudayaan	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tradisi Lisan	158	158	160	305	240	429	429
2	Manuskrip	41	41	43	73	94	94	94
3	Adat Istiadat	65	65	65	146	191	212	212
4	Ritus	273	273	273	385	431	431	431
5	Pengetahuan Tradisional	385	385	385	844	995	996	996
6	Teknologi Tradisional	189	189	189	403	506	507	507
7	Seni	370	370	370	538	588	600	600
8	Bahasa	74	74	74	74	128	128	128
9	Permainan Rakyat	219	219	219	255	273	283	283
10	Olahraga Tradisional	44	44	44	68	86	88	88
11	Cagar Budaya/Warisan Budaya Bendawi	1.452	1.482	1.988	1988	2424	2489	2510
Jumlah		3.270	3.300	3.810	5.079	6.136	6.257	6.278

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, 2024

Unsur pemajuan kebudayaan terklasifikasi ke dalam 10 (sepuluh) Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dan ditambah 1 (satu) obyek berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Secara keseluruhan upaya pemajuan kebudayaan meliputi 11 OPK yang terdiri atas (1) tradisi lisan, (2) manuskrip, (3) adat istiadat, (4) ritus, (5) pengetahuan tradisional, (6) teknologi tradisional, (7) kesenian, (8) bahasa, (9) permainan rakyat, (10) olahraga tradisional, dan (11) cagar budaya. Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 3.270 Obyek menjadi 6.278 Obyek pada tahun 2024. Objek Pemajuan Kebudayaan yang jumlahnya sangat besar pada tahun 2024 yaitu Cagar Budaya/Warisan Budaya Bendawi sebesar 2.510 Objek, Pengetahuan Tradisional sebesar 996 Obyek, dan Seni sebesar 600 Objek.

Terkait ruang lingkup Pemajuan Kebudayaan meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan yang datanya disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.6
Data OPK Yang Dilindungi Tahun 2020 – 2024

No	OPK	Pelindungan					Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Tradisi Lisan	112	119	122	125	129	0,036
2	Manuskrip	30	32	33	34	35	0,039
3	Adat Istiadat	46	48	50	51	52	0,031
4	Ritus	191	202	208	214	220	0,036
5	Pengetahuan Tradisional	270	285	293	302	310	0,035
6	Teknologi Tradisional	132	140	144	148	152	0,036
7	Seni	259	274	282	290	302	0,039
8	Bahasa	52	55	56	58	62	0,045
9	Permainan Rakyat	153	162	167	172	181	0,043
10	Olahraga Tradisional	31	33	34	34	44	0,097
11	Cagar Budaya/Warisan Budaya Bendawi	1392	1474	1515	1610	1610	0,037
	Jumlah	2667	2824	2904	3038	3097	0,038

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Provinsi Riau , 2024

Berdasarkan tabel di atas Data OPK yang dilindungi dari tahun 2020 sampai tahun 2024 terjadi peningkatan dari 2.667 obyek menjadi 3.097 obyek atau penambahan sebesar 430 obyek. Dari data OPK tahun 2024 sebesar 6.278 obyek, Dimana OPK yang dilindungi sebesar 3.097 obyek atau sebesar 49,33 persen. Rata - rata pertumbuhan OPK yang dilindungi pada periode 2020 sampai dengan 2024 adalah sebesar 0,038 persen, dengan rata - rata obyek yang paling besar adalah objek olahraga tradisional dengan rata- rata pertumbuhan 0,097 persen.

Tabel 2.7
Data OPK Yang Dikembangkan Tahun 2020 - 2024

No	OPK	Pengembangan					Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Tradisi Lisan	3	6	10	13	16	0,55
2	Manuskrip	1	2	3	3	4	0,46
3	Adat Istiadat	1	3	4	5	16	1,20
4	Ritus	5	11	16	22	27	0,56
5	Pengetahuan Tradisional	8	16	23	31	39	0,51
6	Teknologi Tradisional	4	8	11	15	19	0,50

No	OPK	Pengembangan					Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
7	Seni	7	15	22	30	50	0,66
8	Bahasa	1	3	4	6	7	0,75
9	Permainan Rakyat	4	9	13	18	30	0,69
10	Olahraga Tradisional	1	2	3	4	15	1,15
11	Cagar Budaya/Warisan Budaya Bendawi	40	80	119	95	159	0,49
	Jumlah	76	153	229	242	382	0,54

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, 2024

Berdasarkan tabel di atas Data OPK yang dikembangkan dari tahun 2020 sampai tahun 2024 terjadi peningkatan dari 76 obyek menjadi 382 obyek atau penambahan sebesar 306 obyek. Dari data OPK tahun 2024 sebesar 6.278 obyek, Dimana OPK yang dikembangkan sebesar 382 obyek atau sebesar 6,08 persen. Rata - rata pertumbuhan OPK yang dikembangkan pada periode 2020 sampai dengan 2024 adalah sebesar 0,54 persen, dengan rata - rata obyek yang paling besar adalah objek adat istiadat dengan rata - rata pertumbuhan 1,20 persen.

Tabel 2.8
Data OPK Yang Dimanfaatkan Tahun 2020 – 2024

No	OPK	Pemanfaatan					Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Tradisi Lisan	3	5	6	8	8	0,30
2	Manuskrip	1	1	2	2	2	0,25
3	Adat Istiadat	1	2	3	4	6	0,58
4	Ritus	5	8	11	15	16	0,35
5	Pengetahuan Tradisional	8	12	16	20	23	0,31
6	Teknologi Tradisional	4	6	8	11	16	0,42
7	Seni	7	11	15	20	27	0,40
8	Bahasa	1	2	3	5	5	0,54
9	Permainan Rakyat	4	7	9	12	43	0,99
10	Olahraga Tradisional	1	1	2	3	5	0,54
11	Cagar Budaya/Warisan Budaya Bendawi	40	60	80	100	100	0,27
	Jumlah	76	115	153	200	251	0,35

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, 2024

Berdasarkan tabel di atas Data OPK yang dimanfaatkan dari tahun 2020 sampai tahun 2024 terjadi peningkatan dari 76 obyek menjadi 251 obyek atau penambahan sebesar 175 obyek. Dari data OPK tahun 2024 sebesar 6.278 obyek, Dimana OPK yang dimanfaatkan sebesar 251 obyek atau sebesar 3,40 persen. Rata - rata pertumbuhan OPK yang dimanfaatkan pada periode 2020 sampai dengan 2024 adalah sebesar 0,35 persen, dengan rata - rata obyek yang paling besar adalah objek Permainan Rakyat dengan rata - rata pertumbuhan 0,99 persen.

Provinsi Riau dalam upaya pemajuan kebudayaan tidak hanya menitikberatkan pada upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan OPK, juga dalam hal pembinaan OPK. Terkait upaya pembinaan OPK yang menjadi sasaran dari upaya ini adalah sumber daya manusia kebudayaan dan lembaga kebudayaan, termasuk lembaga pengelola sarana prasana kebudayaan yang merupakan subyek atau pelaku/penggiat/pemerhati kebudayaan. Sebaran sumber daya manusia kebudayaan dan lembaga kebudayaan dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.9
Sumber Daya Manusia dan Lembaga Kebudayaan
di Provinsi Riau Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	SDM	Lembaga	Sarana Prasarana
1	Kuantan Singingi	8	72	N/A
2	Indragiri Hulu	85	110	N/A
3	Indragiri Hilir	9	77	1
4	Pelalawan	15	47	N/A
5	Siak	25	33	3
6	Kampar	11	51	1
7	Rokan Hulu	17	17	5
8	Rokan Hilir	15	26	4
9	Bengkalis	25	96	1
10	Kep. Meranti	10	79	5
11	Pekanbaru	9	59	10
12	Dumai	4	42	3
Jumlah		233	709	33

Sumber: Data olahan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, 2024

Jumlah sumber daya manusia kebudayaan yang telah diidentifikasi pada 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau sebanyak 233 orang. Namun hingga saat ini dari sejumlah SDM tersebut, belum dapat diidentifikasi jumlah orang yang telah mendapat sertifikasi keahlian dan diakui kompetensinya. Untuk jumlah lembaga kebudayaan yang terdiri atas Lembaga Adat Melayu, Dewan Kesenian, dan sanggar/komunitas/organisasi kebudayaan berjumlah 709 lembaga kebudayaan. Sedangkan jumlah sarana dan prasarana kebudayaan yang terdiri atas museum, taman budaya, gedung balai kerapatan adat, gedung atau panggung seni, perpustakaan, dan bioskop berjumlah 33 sarana dan lembaga pengelolanya. Upaya pemajuan terhadap keberadaan SDM, lembaga dan sarana prasarana dalam bidang kebudayaan perlu menjadi perhatian khusus. Upaya sertifikasi, workshop, seminar, fasilitasi program dan operasional, serta upaya optimalisasi dan pembangunan sarana prasarana baru perlu menjadi prioritas dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas.

Pemerintah Provinsi Riau dalam upaya pemajuan kebudayaan telah mengusulkan dan menetapkan warisan budaya baik secara nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam upaya perlindungan status OPK sebagai bagian dari kebudayaan Melayu Riau. Dari tahun 2013 hingga tahun 2024 Provinsi Riau telah mendapatkan pengakuan nasional terhadap 71 Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) dan 223 Cagar Budaya/OPK Bendawi. Adapun jumlah penetapan WBTB dan Cagar Budaya selama kurun waktu 2020 - 2024 serta perbandingan persentasinya terhadap jumlah OPK yang ada, disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.10
Penetapan Warisan Budaya Tak Benda dan Cagar Budaya
Provinsi Riau Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	OPK Non Bendawi	1.822 OPK				
	Peringkat Provinsi					
	• Penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	-	-	-	-	-
	• Persentase					
	Peringkat Nasional					
	• Penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	10	5	8	2	5

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	• Persentase	0,55	0,27	0,44	0,11	0,27
2	OPK Bendawi	1.988 OPK				
	Peringkat Provinsi					
	• Penetapan Cagar Budaya	-	-	25	12	3
	• Persentase	-	-	1,26	0,60	0,15
	Peringkat Nasional					
	• Penetapan Cagar Budaya	-	-	-	1	-
	• Persentase	-	-	-	0,05	-

Sumber: Data olahan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, 2024

Penetapan WBTB dan Cagar Budaya di Provinsi Riau bila dibandingkan dari jumlah OPK yang telah tercatat masih sangat rendah. Perlu strategi dan kebijakan yang tepat untuk dapat mendorong pengusulan dan penetapan WBTB dan Cagar Budaya.

Upaya dokumentasi dan pengkajian OPK non bendawi serta pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya, merupakan langkah konkret dalam menggesa pengusulan dan penetapan WBTB dan Cagar Budaya di 12 Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah

Permasalahan yang dihadapi bidang kebudayaan adalah belum optimalnya pelestarian dan pengelolaan Kebudayaan dalam perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan hal ini disebabkan karena :

1. Belum optimalnya Perlindungan nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional.
2. Belum optimalnya Pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun faktor penghambat dari pelaksanaan pelayanan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau tersebut adalah:

- a. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antar instansi, serta belum optimalnya kerjasama antar pihak, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat.
- b. Terbatasnya sumber daya manusia di bidang kebudayaan yang berkualitas;

- c. Terbatasnya sarana dan prasarana di bidang kebudayaan;
- d. Belum optimalnya hasil penelitian dan pengembangan kebudayaan;

2.3.3. Dampaknya Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, Terhadap Capaian Program Nasional/Internasional dan Sustainable Development Goals (SDGs)

2.3.3.1. Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Kepala Daerah untuk periode 2025-2029 disingkat sebagai Riau Bedelau, yaitu "**Riau Berbudaya Melayu, Dinamis, Ekologis, Agamis, dan Maju**". Visi ini mencerminkan harapan untuk pembangunan yang berkelanjutan dan berlandaskan pada nilai-nilai kebudayaan Melayu yang kuat dan beragama. Pemerintah Provinsi Riau dalam komitmennya menjaga dan mengembangkan kebudayaan Melayu sebagai bagian dari identitas serta fondasi masa depan dan oleh sebab budaya yang bersifat kekal dan dapat menjadi kekuatan baru dalam pembangunan daerah.

Untuk mewujudkan visi tersebut, telah disusun tujuh misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- Misi 1 : Membangun manusia yang sehat dan berkualitas melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkeadilan serta keberpihakan pada disabilitas dan kelompok marginal.
- Misi 2 : Meningkatkan perekonomian, daya saing dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan.
- Misi 3 : Memperkuat infrastruktur yang handal, guna kemudahan akses, pelayanan masyarakat dan perekonomian serta peningkatan konektivitas antar wilayah.
- Misi 4 : Memerangi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah serta menjaga keseimbangan dan pemerataan pembangunan.
- Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan berintegritas serta pelayanan publik yang berkualitas dengan dukungan aparatur yang kompeten dan profesional menuju pemerintahan yang berkelas dunia (world class government).

Misi 6 : Memperkuat riset dan inovasi serta kerjasamapembangunan guna akselerasi capaian pembangunan melalui multi helix partnership, kerjasama antar daerah maupun kerjasama global.

Misi 7 : Mewujudkan kebudayaan Melayu sebagai alat pemersatu dan perwujudan nilai nilai kearifan lokal serta mendorong kehidupan bermasyarakat yang kondusif,aman, nyaman dan adil untuk semua

2.3.3.2. Terhadap Pencapaian Program Nasional

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 urusan Bidang Kebudayaan masuk pada Prioritas Nasional 8 yaitu “Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur”. Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan Prioritas Nasional 8, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut :

Sasaran 1



Terwujudnya Kehidupan Beragama yang Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Isu

- **Nilai agama belum optimal diejawantahkan menjadi kerja-kerja pembangunan yang membawa kebaikan bersama**, ditunjukkan dengan potensi zakat di Indonesia yang besar (Rp327,6 Triliun, 2023), namun realisasi pengumpulan zakat masih belum optimal (Rp32,32 Triliun, 2023).
- **Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia belum sepenuhnya diimplementasikan** dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang tecermin dari masih maraknya praktik korupsi [Indonesia peringkat ke-115 dari 180 negara dengan skor 34 (Indeks Persepsi Korupsi, 2023)].
- **Kurangnya perhatian terhadap pembangunan sosial kemasyarakatan**, khususnya dalam aspek kohesi sosial, inklusi sosial, dan pengembangan kapasitas masyarakat sipil [Indeks Pembangunan Masyarakat 62,85 (2021)].
- **Masih kurangnya jaminan perlindungan terhadap wilayah adat dan hutan adat**, ditunjukkan dengan masih terbatasnya wilayah adat yang tersertifikasi (5,99 persen dari total 7,51 juta hektare wilayah adat) dan pengakuan hutan adat [8 persen dari total 3,4 juta hektare potensi hutan adat (BRWA, 2024)].
- **Karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global**, ditandai dengan prevalensi penyalahgunaan narkoba (3,3 juta jiwa, 2023), 36 persen siswa pernah mengalami perundungan (Asesmen Nasional, 2022), serta maraknya praktik judi online [terdapat 168 juta transaksi judi online dengan total akumulasi perputaran dana mencapai Rp327 Triliun (PPATK, 2023)].
- **Wawasan dan identitas nasional** sebagai bangsa majemuk **tidak serta merta melahirkan kehidupan beragama dan berbudaya yang inklusif**, tecermin dari masih adanya sikap intoleransi pada sebagian kelompok masyarakat [Indeks Kerukunan Umat Beragama 76,02 (2023)].
- **Kebudayaan belum sepenuhnya dipertimbangkan** sebagai modal dasar pembangunan dan penggerak transformasi sosial [Indeks Pembangunan Kebudayaan 57,13 (2023)].
- **Khazanah kearsipan nusantara belum optimal dikembangkan** untuk memperkuat memori kolektif bangsa dan tata kelola pemerintahan [Indeks Memori Kolektif Bangsa 69,10 (2024)].

Arah Kebijakan

- Penguatan kerukunan umat beragama dan layanan keagamaan transformatif untuk mewujudkan kehidupan beragama maslahat
- Pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa

Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 8, dilakukan serangkaian intervensi pada arah kebijakan terkait Urusan Bidang Kebudayaan pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 sebagai berikut :

No	Sasaran dan Indikator	Realisasi 2024	Outlook 2025	Target 2026
Terwujudnya Kawasan Pemajuan Kebudayaan yang Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan, dan Peningkatan Kualitas SDM Kebudayaan				
1	Persentase Penduduk yang Bekerja di Bidang Seni Budaya (%)	0,43 (2023)	0,49	0,51

No	Sasaran dan Indikator	Realisasi 2024	Outlook 2025	Target 2026
2	Jumlah Kawasan Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan (Kumulatif) (kawasan)	1	1	3

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah)

Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan, sebagai upaya mengembangkan kawasan pemajuan kebudayaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas SDM. Strategi pelaksanaan intervensi tersebut adalah pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional yang dilaksanakan melalui pemanfaatan dan pengembangan karya seni beserta konten media kebudayaan. Selain itu juga dilakukan pengelolaan terpadu cagar budaya di kawasan pemajuan kebudayaan melalui pelestarian cagar budaya, Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB), dan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), serta pengembangan desa pemajuan kebudayaan.

- Terhadap Pencapaian SDGs

Preservasi merupakan upaya untuk meminimalisir kerusakan yang disebabkan oleh faktor lingkungan maupun kecelakaan sehingga membahayakan warisan budaya dan alam yang dijaga maupun sekitarnya. Perlindungan merupakan proses penerapan suatu metode tertentu untuk melindungi kondisi fisik dari warisan budaya dan alam dengan menjaganya agar tidak rusak, hilang maupun hancur. Konservasi warisan budaya berbeda dengan konservasi warisan alam. Konservasi warisan budaya merupakan langkah yang diambil untuk memperpanjang usia warisan

budaya tertentu yang sinergis dengan upaya untuk memperkuat penyebaran nilai dan pesan budaya tersebut.

Sementara konservasi warisan alam merupakan langkah untuk melindungi, menjaga, mengelola dan merawat ekosistem, habitat, flora dan fauna langka, masyarakat adat, baik di dalam maupun di luar lingkungan aslinya untuk menjaga keberadaannya dalam jangka waktu panjang.

Warisan budaya terdiri atas warisan budaya benda (*tangible*) dan warisan budaya tak benda (*intangible*). Di Indonesia, warisan budaya benda ini sering pula disebut dengan cagar budaya. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang berlokasi di darat maupun perairan serta perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan (UU No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya). Warisan alam adalah bentukan dan kawasan alam, geologi atau fisik-geografis yang menjadi habitat satwa dan tanaman yang hampir punah, serta lokasi alam yang memiliki nilai pendidikan, konservasi atau keindahan alam. Warisan alam ini termasuk taman dan hutan lindung, kebun binatang, akuarium dan kebun raya (UNESCO, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, 1972). Selain itu, terdapat pula warisan campuran dimana suatu situs memiliki warisan budaya dan alam dalam satu lokasi. Namun, indikator ini juga belum tersedia sehingga data belum dapat disajikan.

2.3.4. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan pembangunan kebudayaan juga dipengaruhi oleh dukungan sumberdaya yang memadai seperti sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, termasuk ketersediaan fasilitas informasi dan teknologi yang sesuai dengan perkembangan zaman, kelembagaan, pendanaan, kemitraan, serta penelitian dan pengembangan. Dalam melakukan pemajuan kebudayaan Melayu khususnya di Provinsi Riau, sebagaimana dalam memajukan kebudayaan lainnya, permasalahan tentu tidak bisa dihindari. Jika melihat kondisi dan sekaligus posisi Provinsi Riau maka terdapat beberapa tantangan yang saat ini menjadi permasalahan dalam memajukan kebudayaan melayu. Diantara tantangan tersebut Antara lain :

- a. Pengaruh budaya global yang dipicu oleh perkembangan teknologi informasi

(TI) yang dapat menyebabkan menurunnya pengamalan adat istiadat Melayu, dan perubahan sifat dan perilaku generasi muda;

- b. Nilai-nilai luhur dalam budaya Melayu semakin tidak dikenal oleh masyarakat terutama generasi muda;
- c. Kerjasama antara pelaku seni budaya dan insan budaya dengan pemerintah belum terpadu, sehingga upaya pelestarian dan pemanfaatan seni budaya dalam diplomasi budaya, kunjungan kebudayaan dan pariwisata belum optimal;
- d. Terbatasnya dokumentasi, kajian sejarah lokal, kelengkapan data kebudayaan dan tradisi baik yang bersifat warisan budaya, situs dan warisan budaya tak benda, sehingga apresiasi budaya dalam masyarakat belum optimal;

Dalam meningkatkan pelayanan, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dihadapkan kepada peluang dan tantangan. Adapun peluang-peluangnya antara lain:

1. Potensi keanekaragaman warisan dan kekayaan kebudayaan yang dimiliki;
2. Tingkat keanekaragaman cagar budaya yang tinggi baik yang berasal dari kelompok masyarakat maupun keanekaragaman dalam konteks peradaban, tradisional hingga modern dan kewilayahan;
3. Jumlah pengunjung museum yang meningkat;
4. Perkembangan kesenian dalam kehidupan masyarakat meningkat baik seni rupa, seni pertunjukan, seni sastra, seni musik dan seni media rekam dan film serta seni desain;
5. Potensi nilai budaya di Provinsi Riau sangat tinggi ;
6. Dukungan pemerintah dalam pengembangan nilai-nilai budaya di Provinsi Riau;

2.3.5. Formulasi Isu-isu Penting

Berangkat dari berbagai permasalahan pembangunan kebudayaan yang dihadapi Indonesia pada umumnya dan Riau pada khususnya, tantangan, peluang dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dirumuskan isu strategis pembangunan kebudayaan di Provinsi Riau melalui berbagai pertimbangan, antara lain: (1) memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran, (2) luasnya dampak yang ditimbulkan, (3) memiliki daya ungkit terhadap pembangunan kebudayaan, (4) kemudahan untuk dikelola.

Berdasarkan hal tersebut, maka rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2026 dan merupakan isu – isu strategis/penting tersebut meliputi 1 aspek isu yaitu :

1. Kelestarian Budaya. Isu tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi objek pemajuan kebudayaan Melayu Riau;
- 2) Peningkatan sarana dan prasarana untuk perlindungan objek pemajuan kebudayaan Melayu Riau;
- 3) Peningkatan penyebarluasan, pengkajian, dan pengayaan keberagaman objek pemajuan kebudayaan Melayu Riau;
- 4) Peningkatan internalisasi nilai budaya Melayu, inovasi, komunikasi/kolaborasi;
- 5) Peningkatan pembinaan terhadap SDM dan penggiat kebudayaan Melayu Riau;
- 6) Peningkatan pembinaan lembaga kebudayaan (LAMR), Dewan Kesenian Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan;
- 7) Mengoptimalkan aspek ekonomi kebudayaan dalam Pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan.

24 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2026 dilakukan dengan maksud untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan kinerja pencapaian target yang ada dan telah disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Selain itu review ini didasarkan pada tingkat kinerja yang dicapai Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan/sub kegiatan dan pagu indikatif untuk Dinas Kebudayaan Provinsi Riau berdasarkan rancangan awal RKPD.

Proses yang dilakukan dalam review ini meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Identifikasi prioritas program dan kegiatan/sub kegiatan yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD.
2. Menentukan indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dengan cara membandingkan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan hasil analisis yang dilakukan pada tahap - tahap

sebelumnya.

3. Menyajikan hasil analisis dalam bentuk matrik tabel, dengan menempatkan program/kegiatan/sub kegiatan yang sama pada garis yang sama.
4. Melakukan pengecekan apakah program/kegiatan/sub kegiatan prioritas telah termuat dalam rancangan awal RKPD atau belum.
5. Identifikasi program/kegiatan/sub kegiatan yang sesuai dan tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
6. Menentukan program dan kegiatan/sub kegiatan lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, tolok ukur atau target sasaran program/ kegiatan /sub kegiatan dan pagu indikatif/besaran dana yang dibutuhkan dan dialokasikan untuk setiap program/kegiatan/sub kegiatan.

Hasil proses review terhadap rancangan awal RKPD secara lengkap sesuai dengan Tabel.T-C.31 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang disajikan pada Tabel 2.11 sebagai berikut :

Tabel 2.11 (Tabel.T-C.31)
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026
PROVINSI RIAU

DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				42.501.037.526,81	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				51.001.245.032,17	
	DINAS KEBUDAYAAN				36.701.037.526,81	DINAS KEBUDAYAAN				44.041.245.032,17	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kebudayaan	100%	22.924.308.991,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kebudayaan	100%	27.509.170.789,20	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	254.669.110,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	305.602.932,00	
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru, Marpoan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	254.669.110,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru, Marpoan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	305.602.932,00	
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi	12 Laporan	15.875.281.228,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi	12 Laporan	19.050.337.473,60	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekanbaru, Marpoan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	126 Orang/ Bulan	15.875.281.228,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekanbaru, Marpoan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	126 Orang/ Bulan	19.050.337.473,60	Penambahan target dan anggaran terkait Jumlah Tenaga PPPK
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi	1 Jenis	48.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi	1 Jenis	57.600.000,00	
6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekanbaru, Marpoan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	71 Paket	48.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekanbaru, Marpoan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	71 Paket	57.600.000,00	
7	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum yang dipenuhi	5 Jenis layanan	752.667.512,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum yang dipenuhi	5 Jenis layanan	903.201.014,40	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekanbaru, Marpoan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	54.669.110,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekanbaru, Marpoan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	65.602.932,00	
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekanbaru, Marpoan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	178.492.124,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekanbaru, Marpoan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	214.190.548,80	
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekanbaru, Marpoan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4000 Paket	86.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekanbaru, Marpoan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4000 Paket	103.200.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggadaan yang Disediakan	8 Paket	102.256.278,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggadaan yang Disediakan	8 Paket	122.707.533,60	
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	331.250.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	397.500.000,00	
13	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	3 Jenis Barang	713.230.211,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	3 Jenis Barang	855.876.253,20	
14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	50 Unit	505.230.211,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	50 Unit	606.276.253,20	
15	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	208.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	249.600.000,00	
16	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi	2 Jenis	4.683.052.380,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi	2 Jenis	5.619.662.856,00	
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	423.880.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	508.656.000,00	
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.259.172.380,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.111.006.856,00	
19	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	3 Jenis	597.408.550,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	3 Jenis	716.890.260,00	
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	106.861.760,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	128.234.112,00	
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	50.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	60.000.000,00	
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	94.150.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	112.980.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	346.396.790,00	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	415.676.148,00	
II	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Jumlah Data Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dilindungi dan dikembangkan	106 Data OPK	9.246.964.958,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Jumlah Data Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dilindungi dan dikembangkan	106 Data OPK	11.096.357.949,60	
24	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase Kebudayaan Lintas Kabupaten/ Kota yang dikelola	2,27%	2.777.911.727,00	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase Kebudayaan Lintas Kabupaten/ Kota yang dikelola	2,27%	3.333.494.072,40	
25	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	500 Orang	1.280.525.005,00	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	500 Orang	1.536.630.006,00	
26	Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi	11 Objek	500.000.000,00	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	11 Objek	600.000.000,00	
27						Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah PPKD Provinsi yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan (Dokumen)	1 Dokumen	100.000.000,00	
28	Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Aktivitas/ Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan	11 Kegiatan	997.386.722,00	Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Aktivitas/ Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan	11 Kegiatan	1.196.864.066,40	
29						Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen PPKD Kabupaten Kota yang Dipantau dan Dievaluasi (Laporan)	1 Laporan	50.000.000,00	
30	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi		Persentase pelestarian kesenian tradisional	2,27%	1.469.053.231,00	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi		Persentase pelestarian kesenian tradisional	2,27%	1.762.863.877,20	
31	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	11 Objek	1.165.414.499,00	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	11 Objek	1.398.497.398,80	
32	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	12 Sertifikat	303.638.732,00	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	12 Sertifikat	364.366.478,40	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Lembaga Adat yang di bina	1 Lembaga	5.000.000.000,00	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Lembaga Adat yang di bina	1 Lembaga	6.000.000.000,00	
34	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek	5.000.000.000,00	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek	6.000.000.000,00	
III	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	2,27%	1.285.729.919,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	2,27%	1.542.875.902,80	
35	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Pembinaan Kesenian	100%	1.285.729.919,00	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Pembinaan Kesenian	100%	1.542.875.902,80	
36	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	10 Sertifikat	150.000.000,00	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	10 Sertifikat	180.000.000,00	
37	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	12 Lembaga	1.135.729.919,00	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	12 Lembaga	1.362.875.902,80	
IV	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		Jumlah Sejarah yang dibina	50 Objek	459.056.773,00	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		Jumlah Sejarah yang dibina	50 Objek	550.868.127,60	
38	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi		Jumlah Sejarah Lokal Kab/Kota yang dibina	12 Kab/Kota	459.056.773,00	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi		Jumlah Sejarah Lokal Kab/Kota yang dibina	12 Kab/Kota	550.868.127,60	
39	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	20 Orang	150.000.000,00	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	20 Orang	180.000.000,00	
40	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	1 Dokumen	156.768.773,00	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	1 Dokumen	188.122.527,60	
41	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penulisan Sejarah Lokal Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal	1 Dokumen	152.288.000,00	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penulisan Sejarah Lokal Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal	1 Dokumen	182.745.600,00	
V	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		Jumlah cagar budaya yang dilindungi	156 Objek	2.784.976.885,81	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		Jumlah cagar budaya yang dilindungi	156 Objek	3.341.972.262,97	
42	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi		Persentase penetapan cagar budaya peringkat Provinsi	5%	436.958.744,00	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi		Persentase penetapan cagar budaya peringkat Provinsi	5%	524.350.492,80	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	20 Objek	150.000.000,00	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	20 Objek	180.000.000,00	
44	Penetapan Cagar Budaya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	15 Objek	286.958.744,00	Penetapan Cagar Budaya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	15 Objek	344.350.492,80	
45	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi		Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang dikelola	2 Objek	2.300.000.000,00	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi		Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang dikelola	2 Objek	2.760.000.000,00	
46	Pelindungan Cagar Budaya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	1 Objek	1.100.000.000,00	Pelindungan Cagar Budaya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	1 Objek	1.320.000.000,00	
47	Pengembangan Cagar Budaya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	1 Objek	800.000.000,00	Pengembangan Cagar Budaya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	1 Objek	960.000.000,00	
48	Pemanfaatan Cagar Budaya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	1 Objek	200.000.000,00	Pemanfaatan Cagar Budaya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	1 Objek	240.000.000,00	
49	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Orang	200.000.000,00	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Orang	240.000.000,00	
50	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi		Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang terbit izin membawa ke Luar Daerah Provinsi	2 Objek	48.018.141,81	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi		Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang terbit izin membawa ke Luar Daerah Provinsi	2 Objek	57.621.770,17	
51	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	1 Laporan	48.018.141,81	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	1 Laporan	57.621.770,17	
	UPT MUSEUM SANGNILA UTAMA DAN TAMAN BUDAYA				5.800.000.000,00	UPT MUSEUM SANGNILA UTAMA DAN TAMAN BUDAYA				6.960.000.000,00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Jumlah Data Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dilindungi dan dikembangkan	106 Data OPK	2.500.000.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Jumlah Data Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dilindungi dan dikembangkan	106 Data OPK	3.000.000.000,00	
52	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase Kebudayaan Lintas Kabupaten/ Kota yang dikelola	2,27%	2.500.000.000,00	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase Kebudayaan Lintas Kabupaten/ Kota yang dikelola	2,27%	3.000.000.000,00	
53	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	400 Orang	500.000.000,00	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	400 Orang	600.000.000,00	Termasuk DAK

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	1 Unit	500.000.000,00	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	1 Unit	600.000.000,00	- Termasuk DAK - Revitalisasi GOS
55	Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi	4 Objek	500.000.000,00	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	4 Objek	600.000.000,00	Termasuk DAK
56	Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Aktivitas/Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan	4 Kegiatan	1.000.000.000,00	Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Aktivitas/Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan	4 Kegiatan	1.200.000.000,00	
VI	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Museum	90	3.300.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Museum	90	3.960.000.000,00	
57	Pengelolaan Museum Provinsi		Nilai Akreditasi Museum	A	3.300.000.000,00	Pengelolaan Museum Provinsi		Nilai Akreditasi Museum	A	3.960.000.000,00	
58	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	5 Unit	750.000.000,00	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	5 Unit	900.000.000,00	Termasuk DAK
59	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	5 Orang	150.000.000,00	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	5 Orang	180.000.000,00	Termasuk DAK
60	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1 Unit	1.600.000.000,00	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1 Unit	1.920.000.000,00	
61	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	1 Unit	250.000.000,00	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	1 Unit	300.000.000,00	
62	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit	550.000.000,00	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit	660.000.000,00	
TOTAL					42.501.037.526,81					51.001.245.032,17	

25 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan rencana kerja Tahun 2026 Dinas Kebudayaan Provinsi Riau melakukan penelaahan terhadap program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, baik program dan kegiatan/sub kegiatan yang langsung disampaikan dan ditujukan ke Dinas Kebudayaan Provinsi Riau maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota.

Penjelasan kesesuaian usulan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Masyarakat tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Pada dasarnya usulan tersebut sangat terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, sehingga dapat diterima sebagai usulan program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat menurut Tabel T-C.32. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, disajikan pada Tabel 2.12 sebagai berikut :

Tabel 2.12 (T-C.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Pemerintah Provinsi Riau

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Kecamatan Kunto Darusalam, kabupaten Rokan hulu, Provinsi Riau	Jumlah cagar budaya yang dilindungi	1 Kegiatan	Pengembangan Kawasan Pemukiman Komplek Rumah-Rumah Adat Se Kecamatan Kunto Darusalam
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi		Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang dikelola		
	Pengembangan Cagar Budaya		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan		
2	Program Pengembangan Cagar Budaya	Se kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau	Jumlah Data Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dilindungi dan dikembangkan	1 Kegiatan	Pengembangan Dan Pelestarian Event Tahunan Festival Budaya Antar Etnis
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase Kebudayaan Lintas Kabupaten/ Kota yang dikelola		
	Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi		
3	Program Pengembangan Cagar Budaya	Pangkalan Kerinci- Pelalawan Riau, Provinsi Riau	Jumlah Data Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dilindungi dan dikembangkan	1 Kegiatan	Film Dokumenter Batin-batin Di Kerajaan Pelalawan
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi		Persentase pelestarian kesenian tradisional		
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya		Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Program Pengembangan Cagar Budaya	Pangkalan Kerinci- Pelalawan Riau, Provinsi Riau	Jumlah Data Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dilindungi dan dikembangkan	1 Kegiatan	Film Dokumenter Tradisi Budaya Togak Tongol Di Kabupaten Pelalawan
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi		Persentase pelestarian kesenian tradisional		
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya		Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan		
5	Program Pengembangan Cagar Budaya	Pangkalan Kerinci- Pelalawan Riau, Provinsi Riau	Jumlah Data Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dilindungi dan dikembangkan	1 Kegiatan	Film Dokumenter Destinasi Wisata Budaya Kabupaten Pelalawan
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi		Persentase pelestarian kesenian tradisional		
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya		Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan		
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Balai Adat Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kebudayaan	1 Kegiatan	Meubeler Rumah Adat (Balai Adat kelurahan Peranap)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Desa Cipang Kiri Hilir Kecamatan Rokan IV Koto kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	1 Kegiatan	Bantuan Alat Musik
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pembinaan Kesenian		
	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional		Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya		
8	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	RT.01 RW.022 Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	1 Kegiatan	Bantuan Alat Musik Tradisional
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pembinaan Kesenian		
	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional		Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya		

26 Kelompok Sasaran layanan

Adapun kelompok sasaran layanan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2026 adalah :

1. Lembaga Adat Melayu Riau
2. Dewan Kesenian Riau
3. Lembaga Kebudayaan Tingkat Provinsi
4. Sanggar Kesenian
5. Pelaku Budaya
6. Pelaku Kesenian
7. Dinas terkait Kabupaten/Kota

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tahap awal upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 dimulai melalui RPJMN 2025-2029 yang berfokus pada penguatan fondasi transformasi. RPJMN 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi dan program presiden dengan tetap berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045. Visi RPJMN 2025-2029 mengikuti visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029, yaitu ***Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045***. RPJMN selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra K/L, RPJMD (Provinsi/Kabupaten/Kota) dan RKP serta acuan Badan Usaha/Non State Actors.

Selanjutnya RPJMN 2025-2045 mengusung beberapa misi Presiden yang dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2045. Prioritas Nasional merupakan goals periode jangka menengah tahun 2025-2029. Misi Presiden yang disebut sebagai Asta Cita dan dituangkan menjadi Prioritas Nasional tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat

pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dinas Kebudayaan mendukung kebijakan nasional 2025-2029 melalui dukungan terhadap misi/prioritas nasional ke-8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran perangkat daerah merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Tujuan dan Sasaran Daerah. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Sesuai Perencanaan Strategis Tahun 2025–2029 telah ditetapkan tujuan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau yaitu : “Meningkatkan Pemajuan Budaya Melayu Riau”. Sedangkan Sasaran Dinas Kebudayaan Provinsi Riau yang telah ditetapkan adalah :

1. Meningkatnya Warisan Budaya Melayu
2. Meningkatnya Ekspresi Budaya Melayu
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan pengukuran ketercapaian tujuan dan sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai berdasarkan indikator dan target kinerja dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan Provinsi Riau
Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun 2026
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Pemajuan Budaya Melayu Riau		Persentase Pemajuan Budaya Melayu Riau	63,63 %
		Meningkatnya Warisan Budaya Melayu	Nilai Warisan Budaya	58,90 Nilai
		Meningkatnya Ekspresi Budaya Melayu	Nilai Ekspresi Budaya	49,18 Nilai
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70,00 Poin

3.3 Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan/sub kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2026 sebagai berikut :

- a. Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Riau
- b. Pencapaian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) bidang Urusan Kebudayaan
- c. Memperhatikan Tupoksi dari masing-masing unit kerja bidang;
- d. Memperhatikan program Pemerintah Provinsi dan Pusat;
- e. Mempertimbangkan hasil evaluasi program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun sebelumnya, saat ini dan akan datang.

Selanjutnya program dan kegiatan/sub kegiatan dengan memperhatikan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan/sub kegiatan prioritas Dinas Kebudayaan Provinsi Riau diatas secara garis besar sebagai berikut :

- Jumlah program strategis sebanyak 5 program
- Jumlah kegiatan sebanyak 9 kegiatan
- Jumlah sub kegiatan sebanyak 24 sub kegiatan

Adapun pendanaan prioritas Urusan Kebudayaan pada Renja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2026 adalah sebesar Rp. 10.626.703.589,00,- (sepuluh milyar enam ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus

delapan puluh sembilan rupiah) dengan rincian berdasarkan sumber dana sebagai berikut :

- PAD Provinsi sebesar Rp. 8.409.743.589,-
- DAK Non Fisik Sebesar Rp. 2.216.960.000,00,-

Rincian Program dan Kegiatan Strategis Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel T-C.33. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang disajikan pada Tabel sebagai berikut :

Tabel.3.2 (T-C.33)
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027
PEMERINTAH PROVINSI RIAU

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Pra Kiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3		4	5	6	7	8	9
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				10.626.703.589,00				18.719.653.621,00
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Budaya Melayu Riau yang Dikembangkan		100	6.343.893.589,00			100	9.396.964.958,00
		Persentase Budaya Melayu Riau yang dilindungi		52				54	
		Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan		9				11	
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Kebudayaan Lintas Kabupaten/ Kota yang dikelola		2,27 Persen	704.117.607,00			-	2.927.911.727,00
2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	200.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 Orang	1.280.525.005,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Pra Kiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3		4	5	6	7	8	9
2.22.02.1.01.0010	Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Objek	200.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Objek	500.000.000,00
2.22.02.1.01.0012	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota	Jumlah PPKD Provinsi yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	100.000.000,00
2.22.02.1.01.0013	Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Aktivitas/Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Kegiatan	204.117.607,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Kegiatan	997.386.722,00
2.22.02.1.01.0015	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen PPKD Kabupaten Kota yang Dipantau dan Dievaluasi	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	50.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	50.000.000,00
2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi	Persentase pelestarian kesenian tradisional		2,27 Persen	550.000.000,00			-	1.469.053.231,00
2.22.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Objek	350.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11 Objek	1.165.414.499,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Pra Kiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3		4	5	6	7	8	9
2.22.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Sertifikat	200.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Sertifikat	303.638.732,00
2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Lembaga Adat yang dibina		1 Lembaga	5.089.775.982,00			-	5.000.000.000,00
2.22.02.1.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Objek	5.089.775.982,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Objek	5.000.000.000,00
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan		2,21	1.200.000.000,00			-	1.285.729.919,00
2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pembinaan Kesenian		100 Persen	1.200.000.000,00			-	1.285.729.919,00
2.22.03.1.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Sertifikat	100.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10 Sertifikat	150.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Pra Kiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3		4	5	6	7	8	9
2.22.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Lembaga	1.100.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Lembaga	1.135.729.919,00
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Benda, Bangunan, Struktur, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang telah diterapkan terhadap total pendaftaran		2,25	782.810.000,00			2,39	2.736.958.744,00
		Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan		3,23				3,41	
		Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang telah ditetapkan terhadap Total Pencatatan		3,25				5,52	
		Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan		5,25				3,43	
2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Persentase penetapan cagar budaya peringkat Provinsi		5 Persen	170.947.000,00			-	436.958.744,00
2.22.05.1.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Objek	74.099.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20 Objek	150.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Pra Kiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3		4	5	6	7	8	9
2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Objek	96.848.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15 Objek	286.958.744,00
2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang dikelola		2 Objek	611.863.000,00			-	2.300.000.000,00
2.22.05.1.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Objek	308.870.000,00			1 Objek	1.100.000.000,00
2.22.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Objek	150.061.000,00			1 Objek	800.000.000,00
2.22.05.1.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Objek	75.302.000,00			1 Objek	200.000.000,00
2.22.05.1.02.0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Orang	77.630.000,00			10 Orang	200.000.000,00

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0001 UPT. MUSEUM SANG NILA UTAMA DAN TAMAN BUDAYA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Pra Kiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3		4	5	6	7	8	9
	UPT. MUSEUM SANG NILA UTAMA DAN TAMAN BUDAYA				2.300.000.000,00				5.300.000.000,00
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Budaya Melayu Riau yang Dikembangkan		100	1.650.000.000,00			100	2.000.000.000,00
		Persentase Budaya Melayu Riau yang dilindungi		52				54	
		Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan		9				11	
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Kebudayaan Lintas Kabupaten/ Kota yang dikelola		2,27 Persen	1.650.000.000,00			-	2.000.000.000,00
2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400 Orang	350.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD), DAK Non Fisik-BOP Museum Dan Taman Budaya-Taman Budaya		400 Orang	500.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Pra Kiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3		4	5	6	7	8	9
2.22.02.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	1 Unit	350.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD), DAK Non Fisik-BOP Museum Dan Taman Budaya-Taman Budaya		1 Unit	500.000.000,00
2.22.02.1.01.0013	Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Aktivitas/Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Kegiatan	950.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD), DAK Non Fisik-BOP Museum Dan Taman Budaya-Taman Budaya		5 Kegiatan	1.000.000.000,00
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum		100	650.000.000,00			-	3.300.000.000,00
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	Nilai Akreditasi Museum			650.000.000,00			-	3.300.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Pra Kiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3		4	5	6	7	8	9
2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	100.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Unit	750.000.000,00
2.22.06.1.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	5 Orang	100.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10 Orang	150.000.000,00
2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	250.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Unit	1.600.000.000,00
2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	1 Unit	100.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Unit	250.000.000,00
2.22.06.1.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	1 Unit	100.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Unit	550.000.000,00
J U M L A H					10.626.703.589,00				18.719.653.621,00

Rumusan Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sudah sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya dan pagu indikatif secara keseluruhan sebesar **Rp. 10.626.703.589,00,-** (*sepuluh milyar enam ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah*), dan jika pagu indikatif program/kegiatan/sub kegiatan tanpa Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi **Rp.8.409.743.589,-** (*delapan milyar empat ratus sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah*).

Ada pun beberapa kegiatan /sub kegiatan dengan Rancangan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Penyesuaian terhadap pagu sesuai penetapan RKPD Provinsi Riau tahun 2026 melalui Peraturan Gubernur Riau Nomor 36 Tahun 2025 tanggal 28 Oktober 2025 yang dipengaruhi Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-62/PK/2025 tanggal 23 September 2025 hal Penyampaian Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026.
- Penyesuaian prioritas sesuai dengan tujuan dan sasaran serta program prioritas kepala daerah terpilih yang tertuang dalam RJMD Provinsi Riau 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tanggal 30 September 2025.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2026 adalah seperti ditunjukkan pada Tabel 4.1 dibawah ini. Tabel dibawah berisi Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran pada dokumen Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029 dan dokumen RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029.

Jumlah seluruh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Riau di Tahun 2026 adalah sebanyak :

- a. Program Dinas Kebudayaan berjumlah 5 (enam) Program, terdiri dari :
 - 1 (satu) Program Penunjang Urusan
 - 4 (lima) Program Urusan
- b. Kegiatan Dinas Kebudayaan berjumlah 13 (tiga belas) Kegiatan
- c. Sub Kegiatan Dinas Kebudayaan berjumlah 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan

Kebutuhan dana untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan/sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 31.502.936.674,00,- (*tiga puluh satu milyar lima ratus dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah*).

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2026 disajikan pada Tabel 4.1 sebagai berikut :

Table 4.1
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau Tahun 2026

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KEBUDAYAAN						29.202.936.674,00							35.790.732.401,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						29.202.936.674,00							35.790.732.401,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						29.202.936.674,00							35.790.732.401,00	
1.	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						20.876.233.085,00						-	22.371.078.780,00	
		[Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran]	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100	100	20.876.233.085,00	-	-	-	-	-	-	22.371.078.780,00	-
	2.22.01.1 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			5 Dokumen	50.000.000,00			-	TRANSFOR MASI SOSIAL	DINAS KEBUDAYAAN	-	254.669.110,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1 .01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	50.000.000,00	Kota Pekanbaru, Marpojan Damai, Tangkerang Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFOR MASI SOSIAL	DINAS KEBUDAYAAN		254.669.110,00	DINAS KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.1 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi	-			12 Laporan	17.196.437.123,00			-	TRANSFOR MASI SOSIAL	ASN DINAS KEBUDAYAAN	-	15.875.281.228,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1 .02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				126 Orang/ Bulan	17.196.437.123,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	TRANSFOR MASI SOSIAL	ASN DINAS KEBUDAYAAN		15.875.281.228,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum yang dipenuhi	-			5 Jenis Layanan	553.279.345,00			-	TRANSFOR MASI SOSIAL	ASN DINAS KEBUDAYAAN	-	752.667.512,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1 .06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFOR MASI SOSIAL	ASN DINAS KEBUDAYAAN		54.669.110,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1 .06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	75.000.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFOR MASI SOSIAL	ASN DINAS KEBUDAYAAN		178.492.124,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1 .06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				24 Paket	59.738.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFOR MASI SOSIAL	ASN DINAS KEBUDAYAAN		86.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1 .06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	97.847.345,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFOR MASI SOSIAL	ASN DINAS KEBUDAYAAN		102.256.278,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				23 Laporan	270.694.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFOR MASI SOSIAL	ASN DINAS KEBUDAYAAN		331.250.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1 .07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	-			3 Jenis Barang	100.000.000,00			-	-	ASN DINAS KEBUDAYAAN	-	208.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1 .07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	100.000.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS KEBUDAYAAN		208.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi	-			2 Jenis	2.631.146.617,00			-	TRANSFOR MASI SOSIAL	ASN DINAS KEBUDAYAAN	-	4.683.052.380,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1 .08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	483.700.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFOR MASI SOSIAL	ASN DINAS KEBUDAYAAN		423.880.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1 .08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2.147.446.617,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFOR MASI SOSIAL	ASN DINAS KEBUDAYAAN		4.259.172.380,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	-			3 Jenis	345.370.000,00			-	TRANSFOR MASI SOSIAL	ASN DINAS KEBUDAYAAN	-	597.408.550,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1 .09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				8 Unit	160.610.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFOR MASI SOSIAL	ASN DINAS KEBUDAYAAN		106.861.760,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1 .09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	37.560.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFOR MASI SOSIAL	ASN DINAS KEBUDAYsAAN		50.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1 .09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				84 Unit	50.000.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFOR MASI SOSIAL	ASN DINAS KEBUDAYAAN		94.150.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1 .09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				2 Unit	97.200.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFOR MASI SOSIAL	ASN DINAS KEBUDAYAAN		346.396.790,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						6.343.893.589,00						-	9.396.964.958,00	
		[Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kebudayaan]	Persentase Budaya Melayu Riau yang Dikembangkan Persentase Budaya Melayu Riau yang dilindungi Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	100 17 60	0	0	100 52 9	6.343.893.589,00	-	-	-	-	-	-	9.396.964.958,00	-
	2.22.02.1 .01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Kebudayaan Lintas Kabupaten/ Kota yang dikelola	-			2,27 Persen	704.117.607,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFOR MASI SOSIAL	Masyarakat	-	2.927.911.727,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1 .01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan														

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				100 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFOR MASI SOSIAL	Masyarakat		1.280.525.005,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1 .01.0010	Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan														
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi				6 Objek	200.000.000,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFOR MASI SOSIAL	Masyarakat		500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1 .01.0012	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota														
			Jumlah PPKD Provinsi yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFOR MASI SOSIAL	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1 .01.0013	Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan														

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aktivitas/Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan				1 Kegiatan	204.117.607,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFOR MASI SOSIAL	Masyarakat		997.386.722,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1 .01.0015	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen PPKD Kabupaten Kota yang Dipantau dan Dievaluasi				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TRANSFOR MASI SOSIAL	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1 .02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi	Persentase pelestarian kesenian tradisional	-			2,27 Persen	550.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFOR MASI SOSIAL	Masyarakat	-	1.469.053.231,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1 .02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya														

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan, Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				4 Objek	350.000.000,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFOR MASI SOSIAL	Masyarakat		1.165.414.499,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1 .02.0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan														
			Jumlah Orang/Lembaga				13 Sertifikat	200.000.000,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFOR MASI SOSIAL	Masyarakat		303.638.732,00	DINAS KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.02.1 .03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Lembaga Adat yang dibina	-			1 Lembaga	5.089.775.982,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFOR MASI SOSIAL	Masyarakat	-	5.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1 .03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat														
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				1 Objek	5.089.775.982,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFOR MASI SOSIAL	Masyarakat		5.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
3.	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL						1.200.000.000,00						-	1.285.729.919,00	
		[Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kesenian Tradisional]	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	2,3	0	0	2,21	1.200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.285.729.919,00	-

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.03.1 .01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pembinaan Kesenian	-			100 Persen	1.200.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFOR MASI SOSIAL	Masyarakat	-	1.285.729.919,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.03.1 .01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi				10 Sertifikat	100.000.000,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFOR MASI SOSIAL	Masyarakat		150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.03.1 .01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional														

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				14 Lembaga	1.100.000.000,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFOR MASI SOSIAL	Masyarakat		1.135.729.919,00	DINAS KEBUDAYAAN
4.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						782.810.000,00						-	2.736.958.744,00	
		[Meningkatkan warisan budaya yang dilestarikan]	Persentase Benda, Bangunan, Struktur, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang telah diterapkan terhadap total pendaftaran Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang telah ditetapkan terhadap Total Pencatatan Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	2.81 3.90 4.02 6.32	0	0	2.25 3.23 3.25 5.25	782.810.000,00	-	-	-	-	-	-	2.736.958.744,00	-

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.05.1 .01	Penetapan Cagar BudayaPeringkat Provinsi	Persentase penetapan cagar budaya peringkat Provinsi	-			5 Persen	170.947.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFOR MASI SOSIAL	Masyarakat	-	436.958.744,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.1 .01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				10 Objek	74.099.000,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFOR MASI SOSIAL	Masyarakat		150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.1 .01.0002	Penetapan Cagar Budaya														

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				10 Objek	96.848.000,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFOR MASI SOSIAL	Masyarakat		286.958.744,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.1 .02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang dikelola	-			2 Objek	611.863.000,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFOR MASI SOSIAL	Masyarakat	-	2.300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.1 .02.0001	Pelindungan Cagar Budaya														

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi				1 Objek	308.870.000,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFOR MASI SOSIAL	Masyarakat		1.100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.1 .02.0002	Pengembangan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				1 Objek	150.061.000,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFOR MASI SOSIAL	Masyarakat		800.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.1 .02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya														

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				1 Objek	75.302.000,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFOR MASI SOSIAL	Masyarakat		200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.1 .02.0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya														
			Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Orang	77.630.000,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFOR MASI SOSIAL	Masyarakat		200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0001 UPT. MUSEUM SANG NILA UTAMA DAN TAMAN BUDAYA

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		UPT. MUSEUM SANG NILA UTAMA DAN TAMAN BUDAYA						2.300.000.000,00							5.300.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.300.000.000,00							5.300.000.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						2.300.000.000,00							5.300.000.000,00	
1.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						1.650.000.000,00						-	2.000.000.000,00	
		-	-	-	-	-	-	1.650.000.000,00	-	-	-	-	-	-	2.000.000.000,00	-
	2.22.02.1 .01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Kebudayaan Lintas Kabupaten/ Kota yang dikelola	-			2,27 Persen	1.650.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFOR MASI SOSIAL	Masyarakat	-	2.000.000.000,00	UPT. MUSEUM SANG NILA UTAMA DAN TAMAN BUDAYA
	2.22.02.1 .01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan														

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				400 Orang	350.000.000,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFOR MASI SOSIAL	Masyarakat		500.000.000,00	UPT. MUSEUM SANG NILA UTAMA DAN TAMAN BUDAYA
	2.22.02.1 .01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara				1 Unit	350.000.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFOR MASI SOSIAL	Masyarakat		500.000.000,00	UPT. MUSEUM SANG NILA UTAMA DAN TAMAN BUDAYA
	2.22.02.1 .01.0013	Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan														

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aktivitas /Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan				4 Kegiatan	950.000.000,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFOR MASI SOSIAL	Masyarakat		1.000.000.000,00	UPT. MUSEUM SANG NILA UTAMA DAN TAMAN BUDAYA
2.	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN						650.000.000,00						-	3.300.000.000,00	
	2.22.06.1 .01	Pengelolaan Museum Provinsi	Nilai Akreditasi Museum	-			A Nilai	650.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFOR MASI SOSIAL	Masyarakat	-	3.300.000.000,00	UPT. MUSEUM SANG NILA UTAMA DAN TAMAN BUDAYA
	2.22.06.1 .01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu														

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan				5 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFOR MASI SOSIAL	Masyarakat		750.000.000,00	UPT. MUSEUM SANG NILA UTAMA DAN TAMAN BUDAYA
	2.22.06.1 .01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya				5 Orang	100.000.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFOR MASI SOSIAL	Masyarakat		150.000.000,00	UPT. MUSEUM SANG NILA UTAMA DAN TAMAN BUDAYA
	2.22.06.1 .01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum														

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum				1 Unit	250.000.000,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFOR MASI SOSIAL	Masyarakat		1.600.000.000,00	UPT. MUSEUM SANG NILA UTAMA DAN TAMAN BUDAYA
	2.22.06.1 .01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia				1 Unit	100.000.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFOR MASI SOSIAL	Masyarakat		250.000.000,00	UPT. MUSEUM SANG NILA UTAMA DAN TAMAN BUDAYA
	2.22.06.1 .01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum														

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi				1 Unit	100.000.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TRANSFOR MASI SOSIAL	Masyarakat		550.000.000,00	UPT. MUSEUM SANG NILA UTAMA DAN TAMAN BUDAYA
	J U M L A H							31.502.936.674,00							41.090.732.401,00	

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Uraian rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang terdapat pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 ini diharapkan nantinya sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan akan tercapai sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Daerah Provinsi Riau.

Dalam perjalanannya, apabila terdapat suatu kendala dimana dana yang tersedia belum memenuhi kebutuhan yang tercakup pada Renja Tahun 2026 ini maka kegiatan-kegiatan yang belum terealisasi dapat diusulkan kembali pada perubahan rencana kerja tahun berjalan dan rencana kerja tahun berikutnya.

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan/sub kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan yang diukur berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara kegiatan/sub kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Setiap pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan pada unit kerja di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan/sub kegiatan pembangunan kebudayaan Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kaidah dan peraturan yang berlaku serta mempedomani visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.

2. Dinas Kebudayaan Provinsi Riau berkewajiban untuk melaksanakan Renja PD ini sesuai dengan yang termuat di dalam tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan/sub kegiatan strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.
3. Dinas Kebudayaan Provinsi Riau berkewajiban menjamin konsistensi pencapaian target pembangunan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Renja Tahun 2026 dipergunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), selanjutnya RKA juga sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Pagu anggaran yang tercantum dalam Renja ini masih bersifat indikatif, dengan demikian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026 selain mengacu pada Renja ini disusun berdasarkan standar biaya, standar akuntansi pemerintah, dan kebijakan penganggaran pemerintah.

Pekanbaru, 28 November 2025

**Kepala Dinas Kebudayaan
Provinsi Riau,**



ARYADI S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19671106 199603 1 003



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU
NOMOR Kpts. 14/DISBUD/2025

TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI RIAU TAHUN 2026

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Penyusun Renja Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Periode RPJMD Berakhir pada tahun 2024;
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005 – 2025;
10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Tim Penyusun Renja Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2026, sebagaimana terdapat pada lampiran I keputusan ini;
- KEDUA** : Menetapkan agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2026, sebagaimana terdapat pada lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA** : Tim Penyusun Renja Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi;
2. Melaksanakan penyusunan dokumen Rencana 4 sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku;
3. Melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2026.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
pada tanggal : Januari 2025

**Plt. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI RIAU**



JAHRONA HARAHAHAP, S.Sos., MM
Pembina Tk. I
NIP. 19730105 199403 2 002

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas
Kebudayaan Provinsi Riau
Nomor : Kpts.
14/DISBUD/2025
Tanggal : Januari 2025

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI RIAU TAHUN 2026**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Kebudayaan Provinsi Riau	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Bahasa dan Seni	Anggota
5.	Kepala Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya	Anggota
6.	Kepala Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	Anggota
7.	Kepala Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya	Anggota
8.	Kepala Bidang UPT. Taman Budaya dan Museum Sang Nila Utama	Anggota
9.	Pengelola Program dan Kegiatan	Anggota
10.	Jannata Ardhi, SKM	Operator
11.	Ricko Harlius, SE	Operator
12.	Qodri Nela Antani, S.pd	Operator

Ditetapkan di : Pekanbaru
pada tanggal : Januari 2025

**Plt. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI RIAU**

JAHRONA HARAHAP, S.Sos., MM
Pembina Tk. I
NIP. 19730105 199403 2 002

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas
Kebudayaan Provinsi Riau
Nomor : Kpts. 14/DISBUD/2025
Tanggal : Januari 2025

**AGENDA KERJA TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI RIAU TAHUN 2026**

NO.	URAIAN	JADWAL
1	2	3
1.	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Desember 2025
2.	Penyusunan Rancangan Awal Renja	Januari 2025
3.	Penyempurnaan Rancangan Awal Renja	Februari 2025
4.	Penyusunan Rancangan Renja	Maret 2025
5.	Penyusunan Rancangan Akhir Renja	Mei 2025
6.	Penetapan Renja Perangkat Daerah	Juni 2025

Ditetapkan di : Pekanbaru
pada tanggal : Januari 2025

**Plt. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI RIAU.**

JAHRONA HARAHAHAP, S.Sos., MM
Pembina Tk. I
NIP. 19730105 199403 2 002

Formulasi Penghitungan Target Indikator Tujuan dan Sasaran

Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9	8	9	8	9
1	Persentase Pemajuan Budaya Melayu Riau	$\frac{\text{Jumlah OPK yang dimajukan}}{11 \text{ OPK}} \times 100\%$	$\frac{6}{11} \times 100\%$	54,54	$\frac{7}{11} \times 100\%$	63,63	$\frac{8}{11} \times 100\%$	74,74	$\frac{9}{11} \times 100\%$	83,83	$\frac{10}{11} \times 100\%$	94,94	$\frac{11}{11} \times 100\%$	100
2	Nilai Warisan Budaya	Merupakan Perhitungan Nilai Dimensi Warisan Budaya $D_4 = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 S_{4,i} = \frac{S_{4,1} + S_{4,2} + S_{4,3} + S_{4,4} + S_{4,5} + S_{4,6}}{6}$ $S_{4,i} = \frac{X_{4,i} - \min(X_{4,i})}{\max(X_{4,i}) - \min(X_{4,i})}, i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$	57,40	58,90	60,40	61,90	62,40	63,90						
3	Nilai Ekspresi Budaya	Merupakan Perhitungan Nilai Dimensi Ekspresi Budaya $D_5 = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 S_{5,i} = \frac{S_{5,1} + S_{5,2} + S_{5,3} + S_{5,4}}{4}$ $S_{5,i} = \frac{X_{5,i} - \min(X_{5,i})}{\max(X_{5,i}) - \min(X_{5,i})}, i = 1, 2, 3, 4$	47,69	49,18	50,67	52,16	53,65	55,14						
4	Nilai Sakip	Nilai Sakip = (S₁ x 30%) + (S₂ x 30%) + (S₃ x 15%) + (S₄ x 25%) S₁ = Skor Perencanaan kinerja S₂ = Skor Pengukuran Kinerja S₃ = Skor Pelaporan Kinerja	69,05	70	70,7	71,3	71,8	72,1						

MATRIKS VERIFIKASI
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)
PROVINSI RIAU TAHUN 2026

Dinas : Kebudayaan Provinsi Riau

NO	URUTAN SISTEMATIKA	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI			
			INTEGRASI RENSTRA	SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	COVER	JUDUL COVER : "RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) PROVINSI RIAU TAHUN 2026 DINAS/BADAN..... (sesuai Perangkat Daerah masing-masing)	V	V	-	-
2	PERGUB PENETAPAN	Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2026	-	V	-	-
3	DAFTAR ISI	Sesuai dengan Isi Renja Perangkat Daerah	-	V	-	-
4	DAFTAR TABEL	Judul Tabel dan Halaman Tabel	-	V	-	-
5	BAB I PENDAHULUAN					
	1.1. □Latar Belakang	Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD	V	V	-	-
	1.2. Landasan Hukum	Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.	V	V	-	-
	1.3. Maksud dan Tujuan	Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah	V	V	-	-
	1.4. Sistematika Penulisan	Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.	V	V	-	-
6	BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024					
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 dan Capaian Renstra PD	2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;	V	V	-	-
		2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;	V	V	-	-
		2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;	V	V	-	-
		2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;	V	V	-	-
		2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan	V	V	-	-
		2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut	V	V	-	-
		Menggunakan Tabel T-C.29	V	V	-	-
	2.2. □Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK	V	V	-	-
		Menggunakan Tabel T-C.30	V	V	-	-

Dinas : Kebudayaan Provinsi Riau

NO	URUTAN SISTEMATIKA	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI			
			INTEGRASI RENSTRA	SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD;	V	V	-	-
		Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;	V	V	-	-
		Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (<i>Sustainable Development Goals</i>);	V	V	-	-
		Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; dan	V	V	-	-
		Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.	V	V	-	-
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;	V	V	-	-
		Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;	V	V	-	-
		Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda;	V	V	-	-
		Menggunakan Tabel T-C.31	V	V	-	-
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan/sub kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh. Misalnya melalui Forum SKPD atau kegiatan lainnya;	-	V	-	-
		Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;	-	V	-	-
		Menggunakan Tabel T-C.32	-	V	-	-
	2.6. Kelompok Sasaran Layanan	Kelompok Sasaran Layanan (dapat ditambahkan beberapa sub bab lainnya sesuai dengan kondisi daerah)	V	V	-	-
7	BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH					
	3.1. □Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	-	V	-	-
	3.2.□Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah	V	V	-	-
	3.3. Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan/sub kegiatan.	V	V	-	-
		Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan/sub kegiatan	V	V	-	-
		Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan/sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.	V	V	-	-
		Menggunakan Tabel T-C.33	V	V	-	-
8	BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH					
		<i>Diambil dari SIPD Menu Laporan ==> Renja ==> (sesuai tahapan)</i>	-	V	-	-
9	BAB V PENUTUP	1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.	-	V	-	-
		2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.	V	V	-	-
		3. Rencana tindak lanjut.	-	V	-	-
		4. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah , serta cap perangkat daerah yang bersangkutan.	-	V	-	-

Dinas : Kebudayaan Provinsi Riau

NO	URUTAN SISTEMATIKA	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI			
			INTEGRASI RENSTRA	SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
10	LAMPIRAN	1. SK Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 2. Formulasi dan perhitungan target indikator tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan. 3. Formulir E.29 (Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah Badan/Dinas Tahun 2026) 4. Hal-hal lain yang dianggap perlu	-	V	-	-

Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

1. EDY YULISMAN, SE., M.Si

2. ISKANDAR, S.Pd., MM

3. ABD. RAHMAN SIDIQ, S.Sos

4. DWIKY SYAHPUTERA, SE

5. NENENG YANTI, SE

Pekanbaru, 28 November 2025
 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau
 Verifikator :

1. RAJA JUARISMAN, S.T., M.Si

2. NEIL YULIA, S.E., M.Si

3. MUHAMMAD IKHSAN, S.IP

4. NURBAITY, S.E

5. MUHAMMAD MUHAJIR, S.E